

**BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN HUTAN OLEH  
MASYARAKAT DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

**(Studi Kasus Kelurahan Battang Barat Kecamatan  
Wara Barat Kota Palopo)**

**OLEH**

**NUSQAR MAJID  
M 111 02 063**



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
24-11-09	
kelurahan	
1 eks	
Nama	Hadis
No. Inventaris	45
No. Kias	

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo)**

Nama : **NUSQAR MAJID**

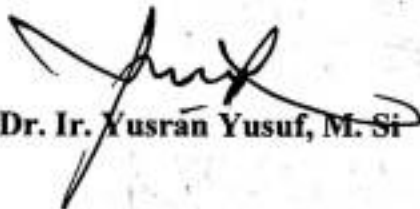
NIM : **M 111 02 063**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Kehutanan  
Pada  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

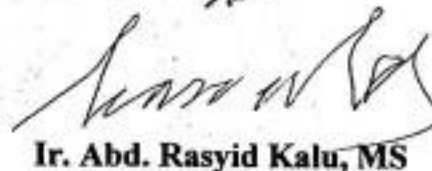
**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M. Si**

**Pembimbing II**



**Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP. 19580626 198601 1 001**

**Tanggal Lulus : November 2009**

## ABSTRAK

**Nusqar Majid (M 111 02 063). Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo) dibawah bimbingan Yusran Yusuf dan Abd. Rasyid Kalu.**

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat telah secara langsung menimbulkan peningkatan kebutuhan masyarakat baik secara individu, kelompok atau bangsa akan sumberdaya hutan, yakni meningkatnya kebutuhan akan kayu untuk perumahan, perabot rumah tangga, dan kayu bakar. Kebutuhan akan bahan makanan yang berkaitan dengan hutan sebagai gudang, serta kebutuhan akan perluasan lahan pertanian dan peternakan. Peningkatan kebutuhan ini telah secara nyata mendorong masyarakat, terutama masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang sangat bergantung terhadap hutan, memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan mengetahui dasar klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009. Populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat yang melakukan aktifitas dalam kawasan hutan. Penentuan sampel responden dilakukan secara purposif sampling yaitu menentukan responden secara terpilih yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung dengan jumlah responden sebanyak 30 orang serta metode

pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian dari 30 orang responden menunjukkan jumlah responden pada kisaran produktif muda sebanyak 7 orang, usia produktif tua sebanyak 17 orang dan usia non produktif sebanyak 6 orang. Sedangkan asal responden dengan kategori penduduk asli sebanyak 24 jiwa dan penduduk pendatang 5 jiwa. Pemanfaatan jasa lingkungan yaitu memanfaatkan potensi air sebagai pembangkit tenaga listrik dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, masyarakat memanfaatkan rotan dari hutan dan pemungutan madu serta nira aren. Bentuk-bentuk penggunaan lahan kawasan hutan berupa kebun yang terdiri dari tanaman cengkeh, kopi, vanili, coklat dan merica. Sedangkan sawah merupakan sawah irigasi non teknis seluas 10 ha dan hanya sedikit jumlah responden yang memiliki persawahan karena topografinya yang bergunung-gunung, untuk tegalan tanaman yang ditanam seperti jagung, cabe, ubi kayu dan kacang tanah. Status kepemilikan tanah dari 30 responden ada dua responden tidak memiliki bukti, satu yang bersertifikat dan 27 orang surat PBB.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan teriring pula shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo)”** ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada Progran Studi Manajemen Hutan dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu sepantasnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M. Si.**, selaku pembimbing pertama atas segala keikhlasannya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS**, selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dosen Penguji** atas saran dan koreksinya terhadap skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M. Sc.**, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Administrasi Fakultas Kehutanan.
6. Bapak Lurah Battang Barat yang telah banyak membantu dan memberi izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Teman-teman **Angkatan '02** Fakultas Kehutanan atas segala kebersamaan dan bantuannya.
8. Keluarga kecil **Biro Khusus Pandu Alam Lingkungan** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga tetap Jaya di Hutan, Jaya di Gunung, Jaya di Akademika.
9. Untuk seseorang yang sangat spesial di hatiku, **Helmiati S. Hut.**, terima kasih atas segala bantuan dan doanya.
10. Keluarga Bapak **Muh. A. Arif Mahmud**, atas segala bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan bakti kepada Ayahanda **Abd. Madjid Abu, SE** dan Ibunda **Maningka**, serta saudara-saudariku dan segenap keluarga atas perhatian, bantuan dan kasih sayangnya.

Hanya kepada Allah SWT jualah senantiasa memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga segala usaha yang telah kita lakukan mendapat ridho-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

*WAssalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Makassar, Nopember 2009**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hutan dan Pengelolaan Hutan .....	5
B. Hutan Lindung .....	6
C. Pemanfaatan Hutan .....	7
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Tempat .....	10
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	10
C. Metode Pengumpulan Data .....	10
D. Analisis Data .....	11
E. Konsep Operasional .....	11



#### IV. KEADAAN UMUM LOKASI

##### A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas .....	13
2. Topografi .....	13
3. Penggunaan Lahan .....	14
4. Iklim .....	14

##### B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk .....	17
2. Mata Pencaharian .....	18
3. Pendidikan .....	19
4. Sarana dan Prasarana .....	19
5. Agama .....	20

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Identitas Responden

1. Umur .....	21
2. Asal Responden .....	22

##### B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan .....

##### C. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu .....

##### D. Sejarah Pemanfaatan Lahan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat .....

##### E. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan

1. Kebun .....	27
2. Sawah .....	27
3. Tegalan / Ladang .....	28
4. Wanatani .....	29
5. Status Kepentingan Lahan .....	29

##### F. Aspek Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan .....

**VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	33
B. Saran .....	34

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Penggunaan Lahan di Kelurahan Battang Barat .....	14
2.	Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan selama 10 Tahun Terakhir (1998 – 2007) di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	15
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab dan Bulan Kering selama 10 Tahun Terakhir (1998 – 2007) di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	16
4.	Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson .....	17
5.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per RW di Kelurahan Battang Barat .....	17
6.	Jumlah Penduduk Kelurahan Battang Barat menurut Kelompok Umur.....	18
7.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Battang barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	18
8.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	19
9.	Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	20
10.	Klasifikasi Responden menurut Umur di Kelurahan Battang Barat .....	21
11.	Klasifikasi Responden menurut Asal Penduduk di Kelurahan Battang Barat	22
12.	Klasifikasi responden Berdasarkan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Kawasan Hutan Lindung di Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat kota Palopo .....	24
13.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan Lahan Berupa Kebun .....	27

14. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan lahan Berupa Persawahan .....	28
15. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan Lahan Berupa Tegalan / Ladang .....	28
16. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan lahan Berupa Wanatani .....	29
17. Klasifikasi Responden Berdasarkan Bukti Klaim Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung Kel. Battang Barat Kec. Wara Barat Kota Palopo .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Rekapitulasi Data Responden Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	37
2.	Dokumentasi Pengambilan Data di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo .....	39
3.	Daftar Pertanyaan (Quisioner) .....	41



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang merupakan modal pembangunan nasional, sehingga sumberdaya alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh masyarakat. Semua sumber daya alam strategis seperti pertanahan, kehutanan, perairan, kelautan dan mineral serta tambang, pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Hal yang sama tentu terjadi pada pemanfaatan sumber daya hutan. Pemanfaatan maupun status kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat telah secara langsung menimbulkan peningkatan kebutuhan masyarakat baik secara individu, kelompok atau bangsa akan sumberdaya hutan, yakni meningkatnya kebutuhan akan kayu untuk perumahan, perabot rumah tangga, pemanas, dan masak memasak. Kebutuhan akan bahan makanan yang berkaitan dengan hutan sebagai gudang, serta kebutuhan akan perluasan lahan pertanian dan peternakan. Peningkatan kebutuhan ini telah secara nyata mendorong masyarakat, terutama masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang sangat bergantung terhadap hutan, memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu menetapkan bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan kelestarian hutan. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan dapat berupa taman nasional, suaka alam, suaka margasatwa, hutan lindung, dll. Dalam penetapan suatu bentuk pengelolaan, pemerintah dihadapkan dengan permasalahan akan kepentingan hutan tersebut, baik dengan masyarakat lokal yang mengklaim kawasan tersebut sebagai hak milik, pemerintah dengan para pengusaha yang memegang izin pengelolaan serta masyarakat dengan para pengusaha. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Berbagai masalah timbul ketika masyarakat mulai mengeksploitasi hutan secara berlebihan, seperti pembalakan liar dan pencurian hasil hutan lainnya. Belum lagi persoalan klaim lahan yang menurut masyarakat adalah milik mereka yang rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Belum lagi ketika pemerintah memarginalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi terhadap sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan Kota Palopo adalah seluas 13,856 ha. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya terdiri atas hutan lindung 66,60 persen, 23,46 persen berupa hutan konservasi, 6,45 persen hutan produksi terbatas dan hutan suaka alam 3,49 persen. Dari data tersebut di atas, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, merupakan wilayah yang terletak dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya terhadap hutan ([www.palopo.go.id](http://www.palopo.go.id)). Masyarakat yang tinggal di dalam

dan sekitar kawasan hutan lindung memanfaatkan kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan ladang dan kebun dll. Klaim terhadap lahan sebagai tanah milik yang merupakan warisan dijadikan sebagai alasan untuk memanfaatkan hutan lindung tersebut, sehingga akan mengancam keberadaan hutan lindung. Oleh pemerintah, tindakan tersebut dianggap sebagai penyerobotan hutan sehingga menimbulkan konflik dengan pemerintah. Karena itu, dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung.



## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
2. Mengetahui dasar klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Kota Palopo.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan dan Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini (Arief, 2001). Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Soeparmoko (1997) menyatakan bahwa hutan selain sebagai sumber produksi kayu juga mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta memelihara kesuburan tanah.
- b. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
- c. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.
- d. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi ( Arief, 2001).

## **B. Hutan Lindung**

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Hadi, 1999).

Hutan lindung sebagai aset bangsa menjadi perhatian semua kalangan baik itu pemerintah, masyarakat, peneliti, LSM dan dunia internasional yang pada saat ini terancam kelestariannya. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sosial dan moral yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat melalui rekreasi, pendidikan dan penelitian pariwisata terbatas (Arief, 2001).

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pasal 12 menyangkut tata hutan pada hutan lindung memuat kegiatan :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Pemanfaatan kawasan hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan seperti budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya seperti pemanfaatan untuk wisata alam, air, keindahan dan kenyamanan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan seperti mengambil rotan, madu dan buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Departemen Kehutanan, 2001).

### **C. Pemanfaatan Hutan**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu

dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Pemanfaatan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan. Namun pengelompokan ini masih kasar karena mempertimbangkan aspek lain seperti usaha atau luas usaha yang diusahakan, penggunaan tenaga kerja, orientasi pasar dan sebagainya. Jika faktor-faktor tersebut dimasukkan maka akan didapatkan tipe penggunaan lahan yang memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai penggunaan lahan (Arsyad, 1989).

Hasil penelitian Yarlin (2007 di Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat berupa persawahan, perkebunan dan pekarangan atau pemukiman. Sebagian masyarakat memiliki lahan persawahan yang digarap berada dalam kawasan hutan yaitu sebesar 55 % dengan luas lahan berkisar antara 1 – 2 ha.

Hasil penelitian Hendryk (2008) di Dusun Matompi Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat adalah sawah, kebun, tegalan dan wanatani

pekarangan. Bentuk-bentuk klaim masyarakat adalah klaim terhadap tanah kelola sebagai tanah warisan. Pola yang sesuai dengan status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan dan pola hutan tanaman rakyat.

Hasil penelitian Hadiputra (2008) di (Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja) menunjukkan bentuk-bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat sesuai PP Nomor 6 Tahun 2007 meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan meliputi budidaya tanaman hias dan budidaya makanan ternak, pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan jasa aliran air dan wisata alam dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan usaha pemanfaatan rotan, madu, getah, buah dan jamur. Sedangkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 berupa kebun, tegalan, wanatani pekarangan dan usaha budidaya rotan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009. Lokasi penelitian bertempat di kawasan hutan Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat yang melakukan aktifitas dalam kawasan hutan. Penentuan sampel responden dilakukan secara purposif sampling yaitu menentukan responden secara terpilih yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung. Data yang dikumpulkan seperti :
  1. Identitas responden meliputi : nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan dan pendidikan.
  2. Persepsi responden terhadap hutan dan keberadaan hutan lindung.

3. Bentuk-bentuk Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dan mengelompokkan luas lahan masyarakat berdasarkan kategori luas < 1 ha, 1- 2 ha, 2-3 ha dan > 3 ha.
  4. Klaim masyarakat dalam kawasan hutan.
  5. Kebijakan Dinas Kehutanan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya dan instansi yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi penduduknya.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi langsung di lapangan.

#### **E. Konsep Operasional**

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
2. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam.
3. Klaim lahan merupakan hak pengakuan atas lahan kelola atas dasar bukti-bukti atau pengakuan masyarakat.



4. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal menetap atau melakukan aktifitas sehari-hari di sekitar hutan.
5. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil-hasil yang yang diperoleh dari kawasan hutan.
6. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.
7. Bentuk pemanfaatan lahan merupakan bentuk penggunaan lahan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
8. Luas lahan merupakan areal lahan atau yang dikelola oleh masyarakat.
9. Sejarah kepemilikan lahan adalah bagaimana lahan tersebut menjadi hak milik yang ditunjukkan dengan tanda bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah ataupun surat bukti kepemilikan lainnya.

## IV. KEADAAN UMUM LOKASI

### A. Keadaan Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Kelurahan Battang Barat secara administratif pemerintahan berada dalam wilayah Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Kelurahan Battang Barat ini berjarak ± 440 km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, ± 26 km dari Ibukota Kota Palopo dan ± 24 km dari Ibukota Kecamatan Wara Barat. Luas Kelurahan Battang Barat adalah 3.026,27 ha, yang terdiri atas 3 RW dan 8 RT yaitu RW I Paredean, RW II Tanete dan RW III Puncak.

Batas-batas wilayah Kelurahan Battang Barat adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Lambe
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Battang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Battang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara

#### 2. Topografi

Kondisi topografi Kelurahan Battang Barat secara makro merupakan daerah pegunungan yang berombak, berbukit hingga bergunung dengan ketinggian > 1000 meter dari permukaan laut dan kelerengan 0 – 85°.

### 3. Penggunaan Lahan

Wilayah Kelurahan Battang Barat sebagian besar berupa kawasan hutan lindung, hutan rakyat, lahan pertanian, perkebunan dan semak belukar. Hanya sebagian kecil saja yang digunakan sebagai lokasi perkantoran, tempat usaha dan pemukiman penduduk. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1 berikut disajikan peruntukan lahan di Kelurahan Battang Barat.

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Kelurahan Battang Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Sawah irigasi non teknis	10
2	Perkebunan	469,58
3	Tegalan / ladang	42,24
4	Tambak	1,57
5	Hutan lindung	1130
6	Hutan rakyat	16,89
7	Pemukiman / pekarangan	31,59
8	Perkantoran	3,6
9	Lainnya (Lahan kering, semak-belukar)	1320,8
	Total	3026,27

Sumber : *Profil Kelurahan Battang Barat, 2008.*

### 4. Iklim

Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling menonjol pada daerah tropis, terutama jika dikaitkan dengan kegiatan menanam baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Pada Tabel 2 disajikan data curah hujan rata-rata Kota Palopo selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama 10 Tahun Terakhir ( 1998 – 2007) di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1998	134	116	100	102	97	46	105	-	57	-	169	201
1999	254	147	161	189	133	109	47	38	99	75	158	223
2000	251	102	180	268	345	297	164	41	25	-	213	358
2001	366	253	469	282	292	270	215	109	100	120	47	221
2002	209	528	358	369	266	223	200	165	114	99	136	379
2003	472	394	287	127	174	315	136	301	48	59	125	316
2004	539	530	140	378	520	87	91	397	463	238	472	385
2005	383	392	472	553	228	127	372	193	27	91	259	158
2006	123	159	328	553	181	206	184	47	46	107	230	315
2007	362	419	240	177	207	58	192	57	109	136	241	275

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2008.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut :

- a. Bulan basah, jika curah hujan  $> 100$  mm,
- b. Bulan lembab, jika curah hujan 60 mm – 100mm,
- c. Bulan kering, jika curah hujan  $< 60$  mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan lembab dan bulan kering selama 10 tahun terakhir di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah.

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab dan Bulan Kering Selama 10 Tahun Terakhir ( 1998 – 2007) di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1998	6	2	4
1999	8	2	2
2000	9	-	3
2001	11	-	1
2002	11	1	-
2003	10	-	2
2004	10	2	-
2005	10	1	1
2006	10	1	2
2007	10	1	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2008.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,3; rata-rata bulan kering 1,7 dan rata-rata bulan lembab 1,0. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kelurahan Battang Barat, yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Q ratio} &= \frac{\text{Rata-rata Bulan Kering}}{\text{Rata-rata Bulan Basah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1,7}{9,3} \times 100 \% \\
 &= 18,28 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Kelurahan Battang barat termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 14,33 % - 33,33 %. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson pada Tabel 4.



Tabel 4. Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson

Tipe Iklim	Nilai Q (%)	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3	Sangat Basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60	Agak Basah
D	60 – 100	Sedang
E	100 – 160	Agak Kering
F	160 – 300	Kering
G	300 – 700	Sangat Kering
H	>700	Luar Biasa Kering

Sumber : *Benyamin Lakitan, 1997.*

## B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

### 1. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Kelurahan Battang Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 901 jiwa yang terdiri dari 427 jiwa laki-laki dan 474 jiwa perempuan dengan 201 KK. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk di Kelurahan Battang Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per RW di Kelurahan Battang Barat.

No	RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	RW I Paredean	162	181	343
2	RW II Tanete	190	202	392
3	RW III Puncak	75	91	166
Jumlah		427	474	901

Sumber : *Profil Kelurahan Battang Barat, 2008.*

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Battang Barat menurut Kelompok Umur.

Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	21	32	53
05 - 14	96	105	201
15 - 24	102	139	241
25 - 54	175	178	353
55 keatas	33	20	53
Jumlah	427	474	901

Sumber : Profil Kelurahan Battang Barat, 2008

.Dari Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Battang Barat berada pada kisaran usia produktif ( 19 tahun keatas).

## 2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Battang Barat bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani, sebagian penduduk Kelurahan Battang Barat bekerja sebagai pegawai, pedagang, tukang, sopir dan lain-lain. Tabel 7 berikut menyajikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Battang Barat.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	(%)
1	Pegawai negeri	7	0,78
2	Pegawai swasta	23	2,55
3	Petani	363	40,29
4	TNI/Polri	-	-
5	Pedagang/wiraswasta/Pengusaha	167	18,53
6	Montir	9	1,00
7	Tukang	10	1,11
8	Sopir	6	0,67
10	Tidak Bekerja	265	29,41
11	Lainnya	51	5,66
Jumlah		901	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Battang Barat 2008.

### 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Battang Barat tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan dan jarak yang ditempuh untuk bersekolah sangat jauh.

Tabel 8. Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

No	Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tidak Pernah Sekolah	186	20,64
2	Tidak Tamat SD	189	20,98
3	Tamat SD	206	22,86
4	SMP	181	20,09
5	SMA	122	13,54
6	Diploma/S1/S2	17	1,89
Jumlah		901	100

Sumber : *Profil Kelurahan Battang Barat, 2008.*

### 4. Sarana dan Prasarana

Secara umum wilayah Kelurahan Battang Barat merupakan wilayah strategis karena merupakan jalur yang menghubungkan dengan wilayah yang menghubungkan Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara, namun sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Battang Barat masih sangat minim. Fasilitas pendidikan masih sangat kurang, sehingga masyarakat yang ingin bersekolah harus melanjutkan sekolahnya di tempat lain. Pasar yang merupakan fasilitas perekonomian tidak terdapat di Kelurahan Battang Barat, sehingga masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual-beli melakukan di pasar yang terdapat di Kota Palopo atau pasar yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Selain itu



terdapat jaringan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Battang Barat dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

No	Jenis	Jumlah
1	TK	-
2	SD	1
3	SMP	-
4	Kantor Lurah	1
5	Masjid/mushallah	4
6	Gereja	1
7	Pasar	-
8	Puskesmas Pembantu	1
9	Posyandu	3

Sumber : *Profil Kelurahan Battang Barat, 2008*

## 5. Agama

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Battang Barat memeluk agama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Penduduk Kelurahan Battang Barat hidup dalam kerukunan beragama yang penuh dengan toleransi.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

#### 1. Umur

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan variasi umur responden mulai dari umur termuda yaitu 25 tahun hingga umur yang tertua yaitu 65 tahun. Responden tersebut merupakan kepala keluarga yang mendiami sekitar kawasan hutan lindung. Penggolongan umur responden dibagi dalam tiga kategori berdasarkan umur produktif dan non produktif. Penggolongan umur 15 - 34 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 35 – 54 tahun dikategorikan usia produktif tua dan diatas umur 55 tahun dikategorikan usia non produktif. Untuk lebih jelasnya pembagian umur responden dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Klasifikasi Responden menurut Umur di Kelurahan Battang Barat

Kategori	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
Usia Produktif Muda	15 – 34	7	23,33
Usia Produktif Tua	35 – 54	17	56,67
Usia nonProduktif	□ 55	6	20
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2009.

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah responden paling banyak terdapat pada kategori usia produktif tua ( 35 – 54 tahun ), ini disebabkan karena sebagian besar usia produktif muda merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

## 2. Asal Responden

Asal penduduk digolongkan dalam dua kategori yaitu penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli yaitu masyarakat yang secara turun temurun tinggal di tempat tersebut dan biasanya terdiri dari suku asli masyarakat setempat. Sedangkan penduduk pendatang yaitu masyarakat yang mendiami suatu lokasi tertentu yang sifatnya menetap (dari daerah lain). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Klasifikasi Responden menurut Asal Penduduk Di Kelurahan Battang Barat

Kategori	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Penduduk Asli	25	83,33
Penduduk Pendatang	5	16,67
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah penduduk asli yang sudah turun temurun berada di desa ini, sedangkan penduduk pendatang yang menetap disebabkan karena adanya penduduk asli yang berkeluarga dengan orang luar dan orang yang datang untuk membuka lahan pertanian kemudian menetap di daerah ini.

### B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung di Kelurahan Battang Barat yaitu memanfaatkan potensi air sebagai pembangkit listrik. Jumlah responden yang menggunakan jasa air sebagai sumber pembangkit tenaga listrik sebanyak 30 orang. Dengan adanya pemanfaatan jasa lingkungan berupa air

sebagai sumber listrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

### **C. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu**

Luas kawasan hutan lindung Kelurahan Battang Barat adalah 1130 ha dimana dalam kawasan hutan terdapat lahan pertanian masyarakat. Selain bertani, masyarakat memanfaatkan hasil hutan berupa pengambilan cabang-cabang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Masyarakat juga mengambil rotan dari hutan dan pemungutan madu serta nira aren. Masyarakat juga sadar akan pentingnya keberadaan hutan untuk kehidupan masyarakat sekitar dan generasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil survei di lapangan dalam kawasan hutan lindung terdapat jalan desa atau jalan penduduk. Hal ini bisa saja menjadi ancaman terhadap keberadaan hutan karena adanya jalan tersebut memudahkan akses ke dalam hutan. Jumlah responden yang melakukan aktifitas di atas dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Kawasan Hutan Lindung di Kel. Battang Barat, Kec. Wara Barat, Kota Palopo

No.	Jenis Aktifitas	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Kayu bakar	11	36,67
2	Kayu bakar, aren	8	26,67
3	Kayu bakar, madu, aren	3	10,00
4	Kayu bakar, rotan, aren	4	13,33
5	Kayu bakar, rotan, madu	2	6,67
6	Kayu bakar, rotan	2	6,67
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua responden mengambil kayu bakar di dalam kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, beberapa responden melakukan aktifitas memungut hasil hutan bukan kayu berupa aren, madu dan rotan.

#### **D. Sejarah Pemanfaatan Lahan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat**

Awalnya masyarakat yang bermukim di Kelurahan Battang Barat menggunakan hutan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Lahan yang dulunya hutan dibabat habis kemudian dikonversi menjadi lahan untuk menanam umbi-umbian, jagung dan ada pula sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong sebagai areal persawahan. Setiap keluarga diberi kewenangan untuk mengolah hutan menjadi lahan pertanian. Lahan hutan yang dikelola keluarga pada saat itu sebanyak 0,5 – 3 ha di mana lokasi lahan pertaniannya terpisah-pisah. Kegiatan pemanfaatan hutan berlangsung terus-menerus sampai diwariskan

kegenerasi berikutnya, namun tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah tetapi diakui oleh seluruh warga masyarakat.

Tahun 1900, Belanda membuat jalan yang menghubungkan kota Palopo dengan Tana Toraja. Masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan berpindah dan membuat pemukiman yang tersebar sepanjang jalan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang akhirnya terbentuklah sebuah desa yang disebut Desa Battang. Masyarakat memutuskan untuk membuka lahan pertanian baru yang aksesnya lebih dekat dari pemukiman, mereka meninggalkan lahan yang dulunya digarap dan sebagian pula tetap mengolah lahan yang lama.

Tahun 1950 terjadi pemberontakan DI/TII yang memaksa masyarakat mengungsi ke daerah pegunungan. Setelah pemberontakan DI/TII berhasil diatasi, masyarakat kembali ke pemukiman mereka dan memulai kembali kegiatan pertanian. Namun seiring dengan penetapan lahan sebagai kawasan hutan lindung pada tahun 1984 dimana pada saat itu masyarakat Desa Battang ditransmigrasikan ke wilayah lain tetapi sebagian tetap bertahan untuk mengolah lahan pertaniannya.

Pada tahun 1984 pemerintah menetapkan wilayah hutan Desa Battang menjadi kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu mentransmigrasikan masyarakat Desa Battang ke daerah Malangke, Lara, Baebunta dan Sabbang sehingga penetapan kawasan hutan tanpa persetujuan masyarakat yang lahan pertaniannya berada dalam kawasan hutan. Sampai saat ini lahan yang mereka kelola terdapat dalam kawasan hutan lindung. Dan pada tahun 2006, Desa Battang dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

### **E. Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan**

Berdasarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan Kelurahan Battang Barat terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang dipengaruhi di sekitarnya. Untuk menjaga agar kawasan hutan lindung dapat berfungsi sebaik-baiknya maka di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung.

Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa didalam kawasan hutan lindung telah ada aktivitas masyarakat, khususnya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian. Penduduk yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian sebanyak 130 KK. Dari sumber informan, diketahui luas lahan yang mereka kelola antara 0,5 – 4 ha. Pembukaan lahan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat dikelompokkan dalam kategori penggunaan lahan sebagai berikut :

## 1. Kebun

Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan antara lain cengkeh, kopi, vanili, coklat dan merica. Biasanya masyarakat mengkombinasikan antara tanaman cengkeh dengan merica atau coklat dengan vanili. Tanaman cengkeh merupakan tanaman yang dominan dan utama karena pengolahan dan harga yang relatif tinggi. Ada pula masyarakat yang menggunakan sistem monokultur dimana tanaman yang ditanam cuma cengkeh, kopi atau coklat saja.

Tabel 13. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan Lahan Berupa Kebun

No.	Luas Lahan (ha)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 1	14	46,67
2	1 - 2	9	30,00
3	2 - 3	4	13,33
4	> 3	3	10,00
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2009.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh responden memiliki kebun yang mereka kelola dan perkebunan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Walaupun berada dalam kawasan hutan lindung, mereka memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat dan PBB.

## 2. Sawah

Areal persawahan yang terdapat di Kelurahan Battang Barat merupakan sawah irigasi non teknis seluas 10 ha. Masyarakat dapat melakukan panen dua kali dalam setahun disebabkan air tersedia cukup banyak.





Tabel 14. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan Lahan Berupa Persawahan

No.	Luas Lahan (ha)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 1	5	83,33
2	1 - 2	1	16,67

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2009.

Tabel di atas menunjukkan hanya sedikit responden yang memiliki areal persawahan. Hal itu disebabkan karena topografi wilayah Kelurahan Battang Barat yang bergunung-gunung menyebabkan warga sangat sulit untuk mencetak sawah.

### 3. Tegalan/Ladang

Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pada pola ini jenis tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman semusim seperti jagung, cabe, ubi kayu dan kacang tanah. Pola ini banyak ditemukan ditepi jalan dimana kondisi lahannya cukup baik tetapi adapula yang kondisi lahannya berbatu.

Tabel 15. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan lahan Berupa Tegalan/Ladang

No.	Luas Lahan (ha)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 1	27	90,00
2	1 - 2	3	10,00

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2009.

Berdasarkan tabel di atas bahwa 90 % responden memiliki tegalan atau ladang yang banyak ditanami oleh tumbuhan cabe, ubi kayu dan kacang tanah.

Tanaman ini hanya untuk konsumsi keluarga. Sedang responden yang memiliki lahan yang lebih luas mengkombinasikan tanaman jagung dan cabe dimana tanaman jagung merupakan tanaman yang dominan.

#### 4. Wanatani

Responden yang memiliki lahan wanatani dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Pemanfaatan Lahan Berupa Wanatani

No.	Luas Lahan (ha)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 1	19	100,00

Pola wanatani yang terdapat di Kelurahan Battang Barat berupa penanaman tanaman merica, vanili dan coklat dengan campuran tanaman cabe, gamal, sayur-sayuran dan ubi kayu. Pada pola ini, tanaman merica, vanili dan coklat dijadikan sebagai tanaman perdagangan sedangkan tanaman cabe dan ubi kayu hanya untuk dikonsumsi oleh keluarga. Sedang tanaman gamal digunakan sebagai tanaman pakan ternak.

#### 5. Status Kepemilikan Lahan

Lahan adalah faktor penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil lahan yang dikelolanya. Kebutuhan akan lahan, baik itu pemukiman atau pertanian mendorong masyarakat untuk mengelolah hutan yang ada disekitarnya. Hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Battang Barat pada

umumnya adalah masyarakat lokal asli yang tinggal sejak mereka lahir. Lahan yang mereka miliki berasal dari warisan keluarga mereka yang dilengkapi dengan surat-surat bukti penguasaan lahan berupa sertifikat dan PBB.

Tabel 17. Klasifikasi Responden Berdasarkan Bukti Klaim Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung Kel. Battang Barat, Kec. Wara Barat, Kota Palopo

Letak Lahan	Jumlah Responden	Bukti Klaim		
		Sertifikat	PBB	Tanpa Bukti
Dalam kawasan hutan lindung	30	1	27	2

Sumber : *Data Primer Setelah Diolah, 2009.*

Berdasarkan penelitian, responden yang memiliki bukti kepemilikan lahan sebanyak 28 orang yaitu berupa sertifikat dan surat PBB, sedang dua responden tidak memiliki bukti dengan alasan bahwa lahan mereka merupakan warisan keluarga secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat.

#### **F. Aspek Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan**

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai

strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat memberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa lain.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan kedalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasi masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan

pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu : fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam menjadi hutan tanaman.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat berupa pemanfaatan jasa air sebagai pembangkit tenaga listrik.
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat berupa pemanfaatan aren, madu dan rotan.
3. Bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung di Kelurahan Battang Barat berupa kebun, sawah, tegalan/ladang, wanatani pekarangan dan pemukiman.
4. Bentuk-bentuk klaim oleh masyarakat adalah klaim lahan kelola sebagai hak milik dengan dasar klaim berupa sertifikat sebanyak 1 orang responden (3,33 %), PBB sebanyak 27 orang responden (90 %) dan pengakuan dari masyarakat sebagai warisan turun-temurun sebanyak 2 orang responden (6,66 %).

## **B. Saran**

1. Pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu lebih ditingkatkan melalui penyuluhan secara kontinyu agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat.
2. Tingkat ketergantungan masyarakat yang besar terhadap kawasan hutan diperlukan adanya suatu kebijakan seperti perubahan status hutan dari hutan lindung menjadi hutan desa sehingga dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjaga hutan agar tetap lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Arsyad, S., 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Departemen Kehutanan dan perkebunan, 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan perkebunan, 1999. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2001. *Manual Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hadiputra, 2008. *Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja)*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hadi Setia T., 1999. *Undang-Undang Kehutanan*. Beserta Peraturan Perubahannya. Harvarindo, Jakarta.
- Hendryk, 2008. *Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Soeparmoko M., 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pemerintahan Daerah.
- Yarlin, 2007. *Studi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.